

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Yolanda Isroyanti

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Email: yolanda.isroyanti@gmail.com

Abstrak

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra pemerintah mempunyai tugas untuk pemenuhan kebutuhan dasar sehingga terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. PKK bertugas untuk merangkul dan membina masyarakat, sehingga semua kalangan masyarakat dapat merasakan hasil dari pembangunan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat, mulai dari tingkat provinsi hingga kelompok dasawisma yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Program dan kegiatan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan program Pemerintah. Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki program- program prioritas yang manfaatnya diharapkan bisa langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (*library research*). Dalam implementasi program PKK yang menggerakkan setiap orangtua untuk jadi orangtua pembelajar dan orang tua hebat. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus program / kegiatan PKK. Pencapaian Program PKK dapat dilihat banyaknya perkembangan yang terwujud dari progam PKK DKI dalam mensejahterahkan keluarga.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan Publik; PKK.

Abstract

The Family Empowerment and Welfare Movement (PKK) as a government partner has a duty to fulfill basic needs so as to realize family empowerment and welfare. The TP.PKK is tasked with embracing and fostering the community, so that all members of society can feel the results of development. The Team for Empowerment and Family Welfare (TP PKK) is an organization engaged in the field of family empowerment and community development, starting from the provincial level to the Dasawisma group whose management is from, by and for the community. The programs and activities of the DKI Jakarta Province PKK Mobilization Team are adjusted to the conditions and needs of the community and are in line with Government programs. The DKI Jakarta Province PKK Activator Team as a strategic partner of the DKI Jakarta Provincial government has priority programs whose benefits are expected to be directly felt by all levels of society. This research is a qualitative research using descriptive analysis techniques with library research. In the implementation of the PKK program which encourages every parent to become a learning parent and a great parent. This is in line with one of the focuses of the PKK program/activity. The achievement of the PKK Program can be seen from the many developments that have materialized from the DKI PKK program in the welfare of families.

Keywords: Implementation; Public Policy; PKK.

LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata, material, spiritual, dan material dengan meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan diharapkan berjalan merata untuk semua. Pembangunan berjalan dengan baik bila didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi (Pathony, 2019). Kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pemerintah. Namun banyak kendala untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga harapan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri sulit untuk diwujudkan. Masalah kesejahteraan keluarga, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan, ekonomi dan hukum. Pengembangan kemampuan ekonomi suatu wilayah untuk menciptakan kesejahteraan dan peningkatan material secara merata adalah kunci dari kemandirian masyarakat, yang berujung pada pemberdayaan masyarakat. Pemikiran pemberdayaan masyarakat sendiri berpendapat bahwa pembangunan akan berjalan sendiri jika masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sumber daya alam mereka dan menggunakannya untuk membangun masyarakat mereka sendiri. Upaya yang disengaja untuk membantu masyarakat lokal merencanakan, memilih, dan mengelola sumber daya lokal sehingga mereka pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial dikenal sebagai proses pemberdayaan sosial (Edi, 2004). Pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk mengatasi tantangan dengan upaya sendiri dan mengembangkan kreativitas untuk memanfaatkan setiap peluang dan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan lingkungannya.

Menurut (Sulistiyani, 2004) pemberdayaan berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi seseorang dan berusaha untuk mengembangkannya. Dengan demikian, pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menuju berdaya, yaitu menggali dan mengembangkan kemampuan seseorang ke arah yang lebih baik. Sedangkan mengatakan (Soetomo, 2011) komunitas dianggap sebagai dasar kehidupan masyarakat, pemberdayaan biasanya difokuskan pada level komunitas. Oleh karena itu, apabila proses Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan pembangunan harus dimulai dari bawah, maka harus dimulai dari kehidupan yang paling dasar. Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Salah satu contohnya adalah PKK, yang merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang dikhususkan untuk wanita. (Asriandi Desi, 2017) mengatakan bahwa "PKK merupakan organisasi masyarakat yang diperuntukkan bagi para wanita agar dapat mengembangkan dirinya di dalam masyarakat", yang berarti bahwa PKK adalah organisasi yang dirancang khusus untuk membantu wanita berkembang di dalam masyarakat. PKK melakukan pemberdayaan melalui program-programnya, salah satunya adalah pendidikan dan keterampilan. Menurut Jovani, Program Pendidikan dan Keterampilan PKK dalam (Ludovikus Bomans Wadu, 2018) mengatakan bahwa "PKK melaksanakan

program keaksaraan fungsional, pelatihan yang dilakukan untuk membuat kerajinan tangan, produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual untuk meningkatkan penghasilan pendapatan keluarga". Dalam program pendidikan dan keterampilan dalam lingkungan masyarakat, wanita dilatih untuk melakukan berbagai kegiatan kerajinan tangan.

Dengan pertumbuhan teknologi informasi yang pesat dan keanekaragaman budaya dan etnis yang ada di Jakarta, tidak mengherankan bahwa banyak tantangan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kenakalan remaja, dan tingginya angka putus sekolah, dan lain-lain. Sebagai mitra pemerintah, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu tujuan TP.PKK adalah untuk merangkul dan membina masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Melalui 10 Program Pokok PKK, gerakan PKK mendukung kebijakan pemerintah. Sebagai mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta memiliki program prioritas yang akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan program-program tersebut, Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti bisnis, swasta, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan LSM (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, 2022). Berdasarkan uraian masalah diatas, keberhasilan implementasi program untuk mencapai tujuan organisasi menarik untuk diteliti. Dari permasalahan yang ada maka judul penelitiannya yaitu Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang diambil untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki *outcome* di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan Ada banyak pendapat tentang definisi kebijakan menurut para ahli. Hogwood dan Gunn dalam bukunya (Handoyo, 2012) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan yaitu: sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (*outcome*), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. (Triyatna, 2012). Dalam buku (Agustino, 2008) implementasi kebijakan, Edward III mempertimbangkan empat faktor atau variabel kritis yang sangat menentukan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi

B. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Mardikanto dan Soebiato, 2015) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang mana masyarakat, terutama mereka yang kurang dalam sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Maka dapat diartikan sebagai paya untuk meningkatkan martabat dan harkat kelompok masyarakat yang saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan perlu adanya sebuah pengelolaan, agar pengelolaannya efektif Tim Pembina (TP) PKK telah dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa agar pengelolaannya efektif. Tugas TP adalah mengkoordinir kegiatan dan membantu berbagai kegiatan untuk mendukung program pembangunan di wilayahnya masing-masing (Indarwati, 2017). Pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah menjadi organisasi kemasyarakatan yang sangat kuat. Kemudian, PKK telah merambah ke tingkat dusun dan RT dengan berbagai program.

Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan, dan kelompok yang terabaikan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi mereka sehingga mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan kajian kepustakaan (*library research*) dimana penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah unsur penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan maupun program yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan pemberdayaan (Fadjriah Hapsari dkk, 2017) tujuan PKK adalah untuk membantu keluarga menjadi lebih baik dengan mewujudkan keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, berbudi luhur, sehat, maju, dan mandiri, memiliki kesetaraan dan keadilan gender, dan memiliki kesadaran hukum dan lingkungan. Pendidikan dan kesehatan masyarakat terkait erat dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, salah satu fokus kegiatan para Kader PKK di lapangan adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendidikan keluarga dan derajat kesehatan melalui

peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak, sesuai dengan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, 2022). Dapat dilihat di salah satu Kota Administrasi Jakarta Timur di kelurahan Ciracas tentang Gerakan PKK. Bahwa persepsi masyarakat tentang tahap identifikasi, implementasi, persepsi, dan preferensi serta evaluasi efektivitas program PKK dalam Memberdayakan Wanita dan Keluarga oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Ciracas menunjukkan bahwa program ini efektif.

Dapat dilihat di salah satu Kota Administrasi Jakarta Timur di kelurahan Ciracas tentang Gerakan PKK. Bahwa persepsi masyarakat tentang tahap identifikasi, implementasi, persepsi, dan preferensi serta evaluasi efektivitas program PKK dalam Memberdayakan Wanita dan Keluarga oleh Tim Penggerak PKK Kelurahan Ciracas menunjukkan bahwa program ini efektif.

Seperti saat Indonesia sedang mengalami pandemic COVID-19, maka PKK berperan sebagai penyalur komunikasi mengenai COVID-19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan Laporan Kegiatan Kepada Gubernur DKI Jakarta, hasil yang telah dilaksanakan dan telah berperan aktif dalam program pencegahan Pandemi Virus Covid 19 yang sedang melanda di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, tujuan kegiatan adalah untuk:

1. Terinformasinya kebijakan Pemerintah kepada wilayah Kota, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan sampai ketingkat RW, RT melalui Kader PKK, agar terlaksananya program pencegahan Pandemi Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta secara terpadu, dan menurunnya penderita Covid 19 di Provinsi DKI Jakarta.
2. Terintegrasinya informasi dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pencegahan Pandemi Virus Covid 19 disemua jenjang PKK.
3. Sosialisasi Kader PKK sebagai Pelopor Perubahan Perilaku di masa Pandemi Covid 19.

B. Sumber Daya

PKK memberi kadernya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di berbagai forum, seperti rapat kerja, rapat kordinasi, dan forum diskusi lainnya. Dalam forum-forum ini, mereka dapat bermusyawarah, menyuarakan keinginan mereka, dan membuat keputusan (Hadiningsih, 2020). PKK juga meningkatkan produktivitas dan memberdayakan anggotanya, sehingga perempuan menjadi pelaksana sekaligus sasaran pemberdayaan. Produktivitas ini dihasilkan dari keaktifan para kader PKK dalam program kerja dan kegiatan yang ada.

Salah satu organisasi yang mendorong perempuan untuk berdaya adalah PKK. Pada umumnya, perempuan akan lebih berkuasa dan berdaya ketika mereka bekerja untuk suatu organisasi daripada secara individual. Sebuah organisasi dikatakan juga berfungsi sebagai tempat bagi perempuan untuk memberdayakan diri. Upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan mereka kesempatan dan peran yang

sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat, martabat, dan integritas mereka sebagai anggota masyarakat dikenal sebagai pemberdayaan perempuan.

C. Disposisi atau Sikap

PKK di Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Anda dapat melihat bagaimana budaya organisasi terkait dengan kepemimpinan. Kinerja anggota staf TP PKK dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh budaya organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat ditingkatkan dan berdampak positif pada kinerja anggota staf. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa budaya dalam suatu organisasi memiliki kemampuan untuk mengontrol bagaimana gaya kepemimpinan mempengaruhi kepuasan kerja, yang berdampak pada peningkatan kinerja karyawan di masyarakat (Marhayani dkk, 2018). Hal demikian terjadi dalam setiap organisasi atau lembaga, dimana tidak terlepas dari penetapan strategi, yang berbeda hanyalah apakah strategi itu tepat, berjalan dengan baik, efisien, dan efektif atau memenuhi semua unsur yang perlu diperhatikan dalam hal penerapannya (Hanjar, 2016)

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kepemimpinannya. Ungkapan luhur yang mengatakan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas kegagalan pekerjaan merupakan ungkapan yang membawa posisi pemimpin pada posisi terpenting dalam organisasi, sehingga diperlukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi dibentuk oleh kriteria-kriteria yang diterima oleh para pendiri organisasi yang kemudian ditetapkan oleh manajemen puncak dan dilaksanakan melalui sosialisasi seluruh elemen organisasi (proses perubahan budaya bagi seluruh anggota). Setelah itu, yang terpilih menurut kriteria tertentu ditetapkan dari dasar atas nilai-nilai, norma-norma dan asumsi-asumsi yang berasal dari filosofi pendiri organisasi.

D. Struktur Birokrasi

Organisasi TP PKK adalah Organisasi yang berjenjang dari Tingkat Pusat sampai Tingkat RT, dan memiliki Kelompok Dasawisma yang menjadi ujung tombak setiap kegiatan di Desa. Dengan memiliki Strategi yaitu melibatkan Seluruh TP.KK dan semua kader PKK secara aktif, sistematis dan berkesinambungan dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. Hubungan Kerja TP.PKK Setiap Jenjang adalah bersifat konsultatif, koordinatif dan hirarkis (Pathony, 2019).

Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi dan manajemen. Pemimpin harus memiliki tugas untuk mengatur dan mengarahkan organisasi dan anggotanya. Umumnya pemimpin berperan sebagai role model atau panutan bagi para anggotanya untuk bekerja dalam organisasi. Ini pada dasarnya tentang bagaimana sikap pemimpin mempengaruhi sikap dan perilaku anggotanya dalam organisasi. Karena itu, seorang pemimpin memiliki kewajiban

moral yang disebut etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan ini merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat diteladani oleh anggotanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Organisasi PKK merupakan salah satu organisasi yang membuat perempuan memiliki kekuatan untuk berdaya. Pada umumnya perempuan akan lebih berdaya dan memiliki power ketika mereka berada atau menjadi bagian dari suatu organisasi dibandingkan bergerak secara individual. Terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap kinerja kader TP PKK. sehingga melalui budaya organisasi inilah diharapkan kepemimpinan dapat ditingkatkan dan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja kader. Dalam implementasi program PKK yang menggerakkan setiap orangtua untuk jadi orangtua pembelajar dan orang tua hebat. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus program/kegiatan PKK. Pencapaian Program PKK dapat dilihat banyaknya perkembangan yang terwujud dari program PKK DKI dalam mensejahterahkan keluarga. Seperti telah mampu melakukan pelatihan dan menjadikan perempuan dapat berkontribusi terhadap sektor ekonomi. Selain itu budaya organisasi dan kepemimpinannya meningkatkan kinerja anggota PKK dalam menjalankan program dan organisasi pun berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini merupakan pengendalian organisasi untuk mengelola proses pengambilan keputusan, karena terkumpulnya dan terolahnya serta tersimpannya fakta dan data yang *up to date*.

Adapun saran untuk kedepannya capaian kinerja dapat diterapkan sesuai dengan mengikuti perkembangan jaman dan mengikuti isu yang berkembang. Supaya tujuan organisasi dapat terealisasi sebagaimana mestinya.

DAFTAR REFERENSI

- Marhayani Dkk. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Kader Tp Pkk . *Journal Of Economics And Business Aseanomics (JEBA)*, 20-37.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Asriandi Desi. (2017). Peran PKK Di Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Muara Bengkal Ilir Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur,. *Ejournal.Ip.Fisipunmul.Ac.Id*.
- Edi, S. (2004). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Fadjriah Hapsari Dkk. (2017). Efektivitas Kelembagaan Sosial Masyarakat Dalam Pemberdayaan Wanita Dan Keluarga Di Kelurahan Uarga Di Kelurahan. *Journal Of Applied Business And Economics*, 266-276.
- Hadiningsih, R. R. (2020). Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Pkk Studi Pada Aktivistik Pkk Di Dasawisma Dahlia, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. *Skripsi*, 1-131.

- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hanjar. (2016). *Kepemimpinan Strategik*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI Badan Pendidikan Dan Pelatihan.
- Indarwati, R. (2017). Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 861-872.
- Ludovikus Bomans Wadu. (2018). Faktor Pendukung Dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 62-71.
- Mardikanto Dan Soebiato. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kabupaten Subang. *International Journal Of Demos*, 262-289.
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. (2022, Febuari 04). *Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta*. Diambil Kembali Dari [Https://Pkk.Jakarta.Go.Id/](https://Pkk.Jakarta.Go.Id/): [Https://Pkk.Jakarta.Go.Id/Ketua-Tp-Pkk/](https://Pkk.Jakarta.Go.Id/Ketua-Tp-Pkk/)
- Soetomo. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani. (2004). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Triyatna, T. (2012). Elaksanaan Koordinasi Oleh Kepala Desa Dalam Upaya Mencapai Efektivitas Penyusunan Program Pembangunan Di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume V No 2 Juli - Desember 2012*, 1-31.